

ISLAM DI KALIMANTAN SELATAN DILIHAT DARI PERSPEKTIF POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Nurwahidah*

ABSTRACT

To understand the Islam in South Borneo through politics and government aspect must be started from the beginning of Banjar Kingdom as the first islamic kingdom in South Borneo. The Banjar kingdom found by Raden Samudera titled Sultan Suriansyah in the couple of 1525 M. The leader of Banjar Kingdom put Islam as the state official religion. In 1860 M, the Banjar kingdom was dismissed by the colonial dutch government. Since that time, the muslim people in south Borneo had no rule in politic and government. When Indonesia declared his independence and did the general election in 1955's, the political aspiration of muslim people given to Nadbatul Ulama and Masyumi while the next general election (1971-1997), the votes of Islamic party decreased slowly.

Kata kunci: Islam, Kerajaan Banjar, politik, pemerintahan

Pendahuluan

Kerajaan Banjar adalah kerajaajaan Islam pertama di Kalimantan Selatan. Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Daha yang beragama Hindu. Dalam Hikayat Banjar ditemui istilah seperti Negeri Banjar, Orang Banjar, Raja Banjar, dan Tanah Banjar.¹ Istilah-istilah itu mengacu kepada pengertian wilayah kerajaan ini, yaitu wilayah kerajaan di mana penduduknya disebut Urang Banjar dan penguasanya disebut Raja Banjar.

*Penulis adalah Dosen tetap Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin.

¹A. Gazali Usman, *Orang Banjar dalam Sejarah* (Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press, 1989) h. 1

Kerajaan ini didirikan oleh Raden Samudera yang bergelar Sultan Suriansyah pada sekitar tahun 1525-1527 M.² Kerajaan Banjar mencapai puncak zaman keemasan pada abad ke 17 dan abad ke 18 M. Pada masa itu terjadi perkembangan Islam di Kalimantan Selatan.

Penetrasi politik kolonial Belanda ke dalam wilayah dan pemerintahan kerajaan Banjar menyebabkan konflik yang berkepanjangan, sehingga kerajaan Banjar menjadi hancur (1860 M), sedangkan kelanjutan kerajaan Banjar adalah *Pemerintahan Pegustian* yang berkedudukan dipedalaman Puruk Cahu, tetapi pemerintahan ini dihancurkan oleh Belanda pada tahun 1905 M, dan sejak itu Belanda semakin memperkuat kekuasaannya diseluruh bekas wilayah kerajaan Banjar. Ekspansi militer diikuti oleh pembentukan pemerintah kolonial di Kalimantan Selatan.

Umat Islam Pada masa kolonial Belanda, tidak mempunyai akses politik di pemerintahan, meskipun begitu pada saat itu muncul organisasi-organisasi seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Musyawaratuththalibin. Ada yang terjun menjadi organisasi politik, dan ada yang mengabdikan diri di bidang sosial. Sedangkan pada masa penjajahan Jepang akses politik sama sekali tidak dibenarkan oleh pemerintah Jepang. Kemudian pada masa sesudah kemerdekaan akses politik umat Islam di Kalimantan Selatan disalurkan melalui partai-partai Islam yang bertarung pada pemilu-pemilu untuk memperebutkan kursi baik untuk DPR RI ataupun di DPR I Kalimantan selatan.

Dari paparan di atas dapat terlihat bagaimana akses politik umat islam yang mengikuti politik dan dalam pemerintahan baik dari mulai kerajaan Banjar, masa kolonial dan pemerintahan Republik Indonesia, dan akan dipaparkan dalam artikel ini, begitu juga tentang ormas-ormas dan partai politik yang ada di Kalimantan Selatan, sampai pada pemilu tahun 1997 M saja.

Sistem Politik dan Pemerintahan pada Masa Awal Kerajaan Banjar

Masyarakat banjar mengenal dua tingkatan kelas dalam masyarakat, yaitu golongan *bangsawan* dan golongan orang *jaba* golongan pertama

²Ahmad Basuni, *Nur Islam di Kalimantan Selatan (Sejarah Masuknya Islam di Kalimantan)* (Surabaya: Bina Ilmu, 1986) h. 26

merupakan kelas penguasa yang memiliki semua hak, yaitu hak dalam politik, mereka terdiri dari famili kerajaan, Golongan ini memiliki posisi teratas dalam struktur sosial. Sedangkan golongan kedua adalah golongan mayoritas dalam masyarakat, dan merupakan kelas terbawah terdiri dari: petani, nelayan, pedagang dan sebagainya.

Pemimpin-pemimpin agama Islam merupakan kelompok penguasa tingkat atas yang mengatur semua kegiatan para pedagang, rakyat umum dan para petani di dalam negeri. Penempatan golongan pemimpin agama pada tempat teratas ini didasarkan pada ketetapan bahwa agama Islam merupakan agama resmi negara, sehingga pemuka-pemuka agama merupakan orang yang memimpin umat ke jalan yang benar.

Pangeran Samudera ketika pertama kali mengatur organisasi kerajaan, kegiatan pertama yang dilakukannya adalah tidak memilih jabatan mangkubumi dari golongan bangsawan famili kerajaan, tapi dipilihlah orang yang biasa yang cakap, mempunyai kemampuan dan dedikasi yang tinggi terhadap negaranya, sehingga orang yang pertama terpilih menjadi mangkubumi adalah Patih Masih. Patih Masih sebagai mangkubumi dibantu oleh empat orang deputi, yaitu: 1) Panganan dijabat oleh Patih Belitung, 2) Pangiwa dijabat oleh Patih Balit, 3) Gumpiran atau Gampiran dijabat oleh Patih Kuin dan 4) Panumping dijabat oleh Patih Muhur.

Mangkubumi mempunyai wewenang dalam masalah administrasi negara untuk mengurus seluruh wilayah negara dan mempunyai wewenang untuk menentukan keputusan terakhir terhadap seseorang yang dijatuhi hukuman mati. Di samping itu Mangkubumi juga mempunyai wewenang dari segala hak penyitaan segala harta benda yang dijatuhi hukuman. Wewenang seperti ini berlaku sampai permulaan abad ke 17 M.

Ke empat deputi yang terdiri dari *Pangiwa*, *Panganan*, *Gampiran*, dan *Panumping*, berwenang juga sebagai jaksa dan hakim, tetapi segala keputusan mereka benar atau salah selalu berdasarkan pada peraturan hukum yang berlaku pada saat itu yang terhimpun dalam sebuah kodifikasi hukum yang disebut *kutara*, yang disusun oleh Aria Taranggana, ketika beliau menjabat Mangkubumi kerajaan. Di samping jabatan-jabatan tersebut di atas, terdapat juga jabatan *Mantri Besar* yang

mempunyai tugas khusus yaitu bertugas sebagai duta kerajaan di daerah ataupun keluar daerah kerajaan.

Orang-orang yang menjabat Mangkubumi pada mulai periode raja pertama, Sultan Suriansyah sampai dengan Sultan Inayatullah (1526-1637 M), orang-orang adalah: 1) Patih Masih dan Patih Aria Taranggana, 2) Patih Anggadipa, 3) Kiai Jayanegara, dan 4) Kiai Tumenggung Raksanegara.

Pada masa pemerintahan Panambahan Kecil (1595-1620 M) kaum bangsawan mempunyai gelar Raden dan Pangeran, dan selalu ikut serta dalam sidang negara. Pada masa itu dalam negara terdapat jabatan-jabatan: Mangkubumi, Mantri Pangiwa-Panganan, Mantri Jaksa, Tuan Panghulu, Tuan Khalifah, Khatib, Para Dipati dan Para Priyai.

Adapun berkaitan dengan masalah-masalah yang menyangkut agama Islam dibicarakan dalam rapat musyawarah yang terdiri dari mangkubumi, dipati, jaksa, khalifah dan penghulu. Yang memimpin musyawarah adalah Panghulu. Oleh karena itu, jabatan panghulu mempunyai status yang tinggi dalam negara, dalam hirarkhi struktur negara kedudukan panghulu adalah di bawah mangkubumi, dan jabatan jaksa di bawah panghulu. Kewenangan panghulu lebih tinggi dari jaksa, karena penghulu mengurus masalah keagamaan, sedangkan jaksa mengurus masalah keduniaan.³

Sitem pemerintahan ini mengalami perubahan, khususnya pada masa pemerintahan Sultan Adam al-Wasik Billah pada permulaan abad ke 19 M. Perubahan ini meliputi jabatan:

1. *Mufti* : Hakim tertinggi, pengawas pengadilan agama.
2. *Qadi* : Kepala urusan hukum Islam.
3. *Panghulu* : Hakim rendah.
4. *Lurah* : Langsung sebagai pembantu lalawangan (kepala distrik) dan mengamati pekerjaan beberapa orang pambakal yang dibantu oleh khalifah, bilal dan kaum.
5. Pambakal : Kepala kampung yang menguasai beberapa anak kampung.

³Basuni, *Nur Islam...*, h. 74, 75, 76.

6. *Mantri* : Pangkat kehormatan untuk orang-orang terkemuka dan berjasa di antaranya ada yang menjadi kepala desa yang wilayahnya sama dengan lalawangan.
7. *Tatuha Kampung* : Orang yang terkemuka di kampung.
8. *Panakawan* : Orang yang menjadi suruhan raja, dibebaskan dari segala pajak dan kewajiban.⁴

Jabatan Mangkubumi adalah jabatan kedua setelah Sultan. Pada abad ke 18 M jabatan Mangkubumi disebut dengan sebutan *Perdana Mantri*, yaitu pada masa pemerintahan Sunan Nata Alam (Sultan Tahmidullah, 1761-1801 M), dan disebut juga *Wazir*. Jadi Mangkubumi, Perdana Mantri, dan Wazir adalah jabatan yang sama.

Pergeseran Sistem Politik dan Pemerintahan dalam Abad ke 17 M.

Selama kekuasaan Sultan Musta'in Billah (1595-1620 M) sitem politik dan pemerintahan negara menjadi lebih kompleks. Tradisi untuk menyelesaikan masalah berkembang menjadi suatu sistem yang kemudian menjadi suatu lembaga yang paling berwenang, yang disebut *Dewan Mahkota*.

Sesudah kematian Ratu Agung bin Musta'in Billah (1637 M) penggantinya adalah Ratu Anum yang bergelar Sultan Saidullah. Selama masa pemerintahannya, dia sebetulnya hanyalah menjadi raja boneka belaka, sebab wewenang kekuasaan politik negara dan pemerintahan dipegang oleh pamannya yang bernama Pangeran Di Darat, ketika Pangeran Di Darat wafat, jabatan dipegang oleh Dipati Tapesana yang mengambil gelar Dipati Mangkubumi yang bertindak sebagai raja. Sejak Pangeran Di Darat menjabat mangkubumi, sejak itun pula jabatan mangkubumi sebagai jabatan tertinggi dalam negara tidak pernah lagi dijabat oleh rakyat umum, tetapi merupakan jabatan yang dimonopoli oleh keluarga kerajaan, yaitu paman, saudara tertua, mertua atau paman yang menjadi mertua dari raja.

⁴Amir Hasan Kiai Bondan, *Suluk Sedjarah Kalimantan*. (Bandjarmasin: Fadjar, 1953), h. 149,150.

Abad ke 17 M adalah masa memuncaknya perdagangan lada. Pada masa ini perdagangan lada menjadi satu-satunya komoditi ekspor kerajaan Banjar. Perkembangan perdagangan ini menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan politik dan pemerintahan. Para penguasa berusaha lebih cepat untuk memperoleh tanah yang lebih luas yang dijadikan wilayah kekuasaan untuk penanaman lada. Besarnya volume perdagangan lada menyebabkan kekayaan melimpah bagi golongan penguasa politik dan perdagangan. Perubahan ini membawa pengaruh yang sangat besar bagi sistem politik dan pemerintahan, karena sejak itu golongan bangsawan yang kaya raya lebih berkuasa dari raja. Mereka mempunyai kekuasaan absolut dalam wilayahnya.

Dewan Mahkota yang terdiri dari keluarga raja, golongan aristokrat, para pejabat tinggi mempunyai kekuasaan besar untuk menentukan situasi politik, ekonomi dan perdagangan negara. Raja tidak dapat melakukan suatu tindakan politik tanpa izin dari Dewan Mahkota, terutama yang menyangkut pembicaraan dengan pedagang asing.

Bagi pedagang luar negeri terutama bangsa Belanda, kekuasaan absolut golongan aristokrat ini sangat merugikan, dan karena itu Belanda tidak dapat memperoleh hak monopoli dalam kontrak yang dibuat pada saat itu.

Sistem Politik dan Pemerintahan pada Masa Pemerintahan Sultan Adam al-Wasik Billah (1826-1857 M)

Setelah penyerangan Belanda pada tahun 1612 M. Banjarmasin menjadi hancur, dan istana Sultan, ibukota kerajaan pindah ke Martapura, daerah pusat kerajaan adalah Karang Intan dan Martapura, yang merupakan pusat pemerintahan dan keraton Sultan. Adapun wilayah kerajaan Banjar meliputi titik pusat istana yaitu istana raja di Martapura dan berada pada titik luar dari daerah Landak ke Berau. Sedangkan daerah Martapura sebagai wilayah pertama dan pusat pemerintahan di mana Sultan berada, sedangkan wilayah territorial yang ke dua terdiri dari: (1) Tanah Laut dan Tanah Rendah, sebelah Barat Meratus, sebelah Selatan Banjarmasin; (2) Daerah Banjar Lama dengan Pelabuhan Banjarmasin; (3) *Banua Ampat*, yaitu daerah Banua Padang, Banua Halat, Parigi dan Gadung di daerah Rantau; (4) Margasari; (5) Alai; (6) Daerah Amandit; (7) Banua Lima,

yang terdiri dari Nagara, Alabio, Sungai Banar, Amuntai, Kalua; dan (8) Muara Bahan, dan Dusun, nama umum untuk daerah atas Barito.

Adapun territorial ke tiga terdiri dari: Tanah Bumbu, Pulau Laut, Karisakan, Pasir, Berau, Kutai, Pantai Timur, Kotawaringin, Landak, Sukadana, Sambas dan pantai sebelah Barat.

Ketiga territorial tersebut dikenal sebagai wilayah Kerajaan Banjar, semua wilayah tersebut membayar persembahan dan upeti, semua daerah itu tunduk bukan karena ditaklukkan, tetapi daerah-daerah ini mengakui di bawah kekuasaan Kerajaan Banjar, kecuali Pasir yang ditaklukkan pada tahun 1636 M dengan bantuan armada kapal Belanda.

Penanaman pengaruh Banjar terhadap daerah-daerah sebagian dilakukan melalui perkawinan politik, ini dilakukan terhadap daerah Tanah bumbu dan Kotawaringin.⁵

Sultan Adam yang berkuasa antara tahun 1826-1857 M mempunyai hak prerogratif dalam masalah-masalah politik dan agama. Hal ini tertulis dalam hukum yang ditulis pada tahun 1835 M. yang dikenal sebagai Undang-undang Sultan Adam. Ciri khas keislaman masyarakat Banjar yaitu ciri khas yang melekat dalam struktur kenegaraan Kerajaan Banjar pada saat itu. Sultan dalam konteks masyarakat Banjar adalah kepala seluruh pajabat agama Islam.⁶ Adapun fungsi Pengadilan Agama dijalankan oleh Hakim Besar yang terdiri dari: *Kepala Qadi, Kepala Mufti, dan Kepala Khalifah*.

Di bawah Mangkubumi ada kelompok kepala yang dikenal sebagai Mantri yang memperoleh title dalam tingkatan hierarkhis seperti: *Adipati, Tumenggung, Kiai Demang, Aria, Ngabehi, Pambakal dan Neyarsa*.

Adapun raja merupakan hierarkhis sosial yang teratas, di samping sebagai Kepala Negara, dan kelompok golongan bangsawan, juga sebagai kepala golongan famili kerajaan yang disebut *Tatuba bubuhan raja-raja*. Raja dapat menghadiahkan kepada keturunannya gelar-gelar seperti: *Pangeran, Gusti dan Ratu*. Bangsawan yang lebih rendah menggunakan gelar seperti *Raden, Anden dan Nanang*.

⁵Johannes Jacobus Ras, *Hikayat Banjar* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1990) h. 455, 456

⁶*Agama dan Etnisitas Kajian tentang Asal-Usul Pembentukan Etnis Banjar*, (Banjarmasin: Jurnal Kebudayaan Kandil, Melintas Tradisi Edisi 6 Thn. II Agustus-Oktober 2004) h. 74.

Penerapan hukum Islam di daerah Kerajaan Banjar adalah sejalan dengan terbentuknya Kerajaan Islam Banjar, di mana dinobatkannya Sultan Suriansyah sebagai raja pertama yang beragama Islam pada hari Rabu tanggal 24 September tahun 1526 M. Terbentuknya Kerajaan Islam Banjar menggantikan kerajaan Hindu Daha dan merubah hukum yang berlaku dari hukum Hindu kepada Hukum Islam. Di sini terjadi transformasi secara mendadak dari kepercayaan Hindu berubah menjadi penganut ajaran Islam.

Dari penelusuran sejarah ditemukan adanya data berupa keputusan penting yang pernah diambil oleh Sultan berkenaan dengan masalah agama yaitu keputusannya berpindah agama menjadi penganut ajaran Islam. Dengan berpindahinya raja dengan agama yang baru ini ternyata diikuti oleh rakyatnya. Keputusan ini direalisasikan dalam bentuk nyata dengan didirikannya masjid yang dikenal dengan Masjid Sultan Suriansyah yang sekarang terletak di Kuwin.

Sebelum kerajaan Banjar terbentuk, Islam sudah lama masuk ke daerah ini, sehingga telah terbentuk sebuah masyarakat Islam di sekitar kerajaan. Dengan asumsi seperti ini dapat diperkirakan bahwa penerapan hukum Islam di kalangan masyarakat berjalan dengan damai tanpa ada ketegangan atau keresahan, sehingga dengan mudah masjid dapat didirikan. Begitulah gambaran tentang pertumbuhan Islam dan penerapan hukum Islam di kalangan masyarakat pada abad ke 16 M di kerajaan Banjar.

Berkaitan dengan perkembangan penerapan hukum Islam, pada abad ke 17 M. Dikenal seorang ulama yang bernama Syekh Ahmad Syamsuddin al-Banjari yang menulis tentang *Asal Kejadian Nur Muhammad* dan menghadiahkan tulisannya kepada *Ratu Aceh Sulthanah Seri Ratu Tajul Alam Safiatuddin Johan Berdaulat* (1641-1675 M). Kitab ini ditulis pada masa pemerintahan Pangeran Tapesena (Adipati Halid, 1642-1660 M). Dengan demikian dalam abad ke 17 M, pada kerajaan Banjar perkembangan tasawuf berkembang, sehingga melahirkan ulama besar dalam bidang tersebut. Dari sisi lain dapat dilihat bahwa telah terjadi interaksi hubungan timbal balik antara Aceh dengan Banjar terutama penyebaran ajaran tasawuf. Hubungan antara kedua kerajaan ini dilanjutkan dengan dikirimnya kitab fiqih *Shirathol Mustaqim* karya ulama besar Aceh

Nuruddin ar-Raniri yang ditulis pada tahun 1055 H. Kitab ini tersebar luas dalam wilayah kerajaan Banjar sebelum Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menyusun kitab *Sabilal Muhtadin*. Kedua kitab fiqih ini berdasarkan mazhab Syafe'i. Oleh karena itu, pengaruh mazhab as-Syafii pada abad berikutnya berkembang pesat, di mana penerapan hukum Islam yang dianut berdasarkan mazhab Syafe'i dan kitab *Shirathol Mustaqim* sebagai rujukan dalam menerapkan hukum Islam di kalangan masyarakat luas.

Meskipun demikian dalam kitab *Shirothal Mustaqim* terdapat kata-kata dalam bahasa Aceh yang tidak dimengerti oleh orang Banjar, di samping itu pada beberapa bagian ditemukan ada beberapa perubahan, hal ini disebabkan oleh para penyalin yang kurang menguasai masalahnya sehingga sukar membedakan mana yang benar, dan teks aslinya tidak ditemukan lagi.

Menghadapi perkembangan hukum Islam seperti ini jelas sekali peranan yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang berhasil menyusun dan menulis kitab *Sabilal Muhtadin* sebagai kitab fiqih terbesar dan lebih lengkap untuk menggantikan kitab *Shirothal Mustaqim*, sebagai rujukan dalam penetapan hukum Islam di Kerajaan Banjar.

Dalam rangka menerapkan hukum Islam Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari adalah konseptor sekaligus mempelopori pembentukan lembaga *Mufti* dan *Qadi* sebagai suatu bentuk lembaga peradilan menurut ketentuan hukum Islam dalam struktur pemerintahan Sultan Tahmidillah bin Sultan Tamjidillah yang bergelar Sultan Nata Alam atau Penembahan Nata (1761-1801 M). Pembentukan lembaga ini dimaksudkan sebagai usaha melaksanakann ketentuan hukum Islam dalam masyarakat Banjar. Lembaga inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bagi pemerintahan Belanda untuk daerah Kalimantan Selatan pada tahun 1937 M dengan nama *Kerapatan Qadhi* dan *Kerapatan Qadhi Besar*.

Perkembangan hukum Islam pada abad ke 18 dan ke 19 M berkembang sangat pesat setelah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari berhasil mengintensifkan dakwah melalui pembinaan kader ulama dalam perkampungan khusus, yaitu Dalam Pagar Martapura. Selain pembinaan ulama yang tersebar luas diseluruh wilayah kerajaan, bahkan sampai keluar wilayah kerajaan. Juga keberhasilan beliau dalam menyusun beberapa

kitab dalam usaha untuk menerapkan hukum Islam di kalangan masyarakat luas. Kitab-kitab itu meliputi masalah *syari'at*, *ushuluddin*, dan *tasawuf*, yang semuanya beraliran *Ahlussunnah wal Jamaah*. Dalam bidang fiqih, beliau menulis beberapa buah kitab, di antaranya adalah: *Fathul Jawad*, *Luqlatul Ajlan*, *Kitabun Nikah*, *Kitabul Fara'id*, dan yang terbesar adalah kitab *Sabilal Muhtadin*.⁷

Kitab *Sabilal Muhtadin* merupakan karya terbesar dan monumental yang terdiri dari dua jilid, berisi masalah ibadah, kitab ini sangat besar andilnya dalam usaha beliau untuk menerapkan hukum Islam dalam wilayah kerajaan Banjar.

Pengaruh lebih jauh dari pemikiran Syakh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam hal penerapan hukum Islam ini secara konkret ketika Sultan Adam al-Wasiq Billah (1826-1857 M) yang pada masa mudanya adalah murid Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menetapkan suatu ketetapan hukum yang terkenal dengan nama *Undang-undang Sultan Adam*. Dalam penyusunan undang-undang ini peranan dari kelompok ulama sangat besar, dan dapatlah dikatakan bahwa Undang-undang Sultan Adam merupakan hukum tertulis yang jelas untuk menerapkan hukum Islam di kalangan masyarakat Banjar.

Situasi Politik Abad ke 19 M.

Abad ke 19 M ditandai dengan pemerintahan Sultan Sulaiman al-Mutammidullah. Setelah Sultan dilantik, Belanda mengadakan perjanjian dengan Sultan pada 19 April 1802 M. Perjanjian hanya mengingatkan kembali bahwa Kerajaan Banjar telah diserahkan kepada pemerintahan Belanda seperti Perjanjian 1787 M. (Perjanjian pada tahun 1787 M ini dibuat oleh Susuhunan Nata Alam dengan Belanda sebagai imbalan bantuan Belanda menghadapi serangan Pangeran Amir yang dibantu oleh orang-orang Bugis, isi perjanjian itu adalah di mana raja-raja Banjar memerintah kerajaan Banjar sebagai peminjam tanah dari VOC (Belanda).

Pada tahun 1826 M, diadakan perjanjian kembali antara Pemerintah Hindia Belanda dengan Sultan Adam, berdasarkan perjanjian dengan VOC

⁷Lihat, M. Syuriansyah Ideham, dkk, *Sejarah Banjar...*, h. 145,146

terdahulu, maka Belanda dapat mencampuri pengaturan masalah mengenai pengangkatan Putera Mahkota dan Mangkubumi, yang mengakibatkan rusaknya adat kerajaan dalam hal ini, hal inilah yang menyebabkan pecahnya Perang Banjar.

Pada waktu Sultan Adam al-Wasiq Billah menjadi Sultan, beliau memetintah didampingi oleh Sultan Muda Abdurrahman, yaitu putera mahkota calon pengganti Sultan kalau sultan mangkat. Sultan Muda mengawini Ratu Antasari, adik perempuan dari Pangeran Antasari, sayangnya Ratu Antasari wafat sebelum melahirkan seorang putera. Pada tahun 1817 M, lahirlah seorang putera Sultan Muda Abdurrahman dari seorang selir keturunan Cina, Nyai Besar Aminah yang diberi nama Pangeran Tamjidillah. Pangeran Muda Abdurrahman menghendaki agar anaknya ini dapat diterima sebagai raja penerus keturunan kerajaan, tapi usulnya tidak diterima oleh Sultan Adam karena hal ini bertentangan dengan tradisi yang berlaku di kerajaan. Sultan Abdurrahman dikawinkan lagi dengan seorang puteri bangsawan yang bernama Ratu Siti, puteri Mangkubumi Nata. Pada tahun 1822 M, lahirlah seorang putera yang diberi nama Pangeran Hidayatullah, kedua putera Sultan Muda ini mempunyai watak yang sangat berbeda. Pangeran Tamjidillah sangat menyenangi pergaulan dengan orang-orang Belanda, dan meminum minuman keras telah menjadi kebiasaan baginya, sedangkan adiknya Pangeran Hidayatullah seorang yang sangat taat kepada agama dan sangat disenangi oleh kaum ulama.

Malapetaka Kerajaan Banjar diawali dengan wafatnya secara mendadak Sultan Muda Abdurrahman pada tahun 1852 M. Sejak meninggalnya Sultan Muda Abdurrahman timbullah benih-benih perpecahan dan pertentangan antara keluarga bangsawan, dan merupakan salah satu faktor penyebab hancurnya Kerajaan Banjar.

Ada tiga kubu yang memperebutkan kekuasaan dalam kerajaan Banjar, kubu Pangeran Tamjidillah putera dari seorang selir, kubu Pangeran Hidayatullah putera seorang puteri bangsawan, dan kubu Pangeran Prabu Anom, putera Sultan Adam al-Wasiq Billah yang merupakan adik dari Sultan Muda Abdurrahman.

Dengan kekuasaan yang ada pada pemerintahan Belanda, mereka mengangkat Pangeran Tamjidillah menjadi Sultan Muda (Putera Mahkota,

1852 M), dan mengangkat Pangeran Hidayatullah sebagai Mangkubumi (1856 M), sedangkan Pangeran Prabu Anom di Banjarmasin.

Sultan Adam yang menginginkan Pangeran Hidayatullah menjadi Sultan Muda dan Prabu Anom menjadi Mangkubumi, telah mengirim utusan ke Batavia untuk meminta persetujuan dari Pemerintahan Hindia Belanda, tetapi permintaan beliau ditolak oleh Belanda, sehingga tidak ada pilihan lain dari Sultan Adam selain membuat "Surat Wasiat" yang hanya boleh dibuka dan dibaca setelah Sultan Adam wafat. Isi wasiat tersebut antara lain: "Pangeran Hidayatullah menggantikan beliau, apabila beliau meninggal dunia, dan memerintah rakyat dengan penuh keadilan dan benar-benar mengikuti perintah agama Islam".

Ketika Sultan Adam al-Wasiq Billah wafat pada tahun 1857 M karena sakit. Tanpa sepengetahuan Dewan Mahkota, dua hari sesudah pemakaman Sultan, pemerintah Belanda menobatkan Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan, sedangkan Prabu Anom yang telah ditahan oleh Belanda diasingkan ke Pulau Jawa.⁸

Pengangkatan Sultan Tamjidillah ini membuat kalangan bangsawan merasa tidak puas, karena pengangkatan ini telah melanggar tradisi istana, melanggar surat wasiat Sultan Adam, di samping tingkah laku Sultan Tamjidillah yang sejak semula tidak disenangi oleh kaum bangsawan Banjar.

Pangeran Hidayatullah mengangkat senjata melawan Belanda, sehingga menyebabkan Belanda menyadari kesalahannya. Kolonel Andersen sebagai kepala pemerintahan Militer Belanda menurunkan Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan (1859 M), dan mengangkat Pangeran Hidayatullah sebagai Sultan, tapi ternyata usaha ini gagal meredam pemberontakan, karena Pangeran Hidayatullah lebih berpihak kepada rakyatnya.

Pengaruh golongan ulama sangat besar dalam membangkitkan semangat perjuangan menghadapi Belanda sebagai jihad dijalan Allah. Seluruh rakyat taat pada petuah kaum ulama, bahwa perang menghadapi Belanda adalah Perang Suci sehingga kefanatikan terhadap agama membuat orang-orang tidak takut mati. Dengan semangat berjihad fi sabilillah kaum

⁸A. Gazali Usman, "Pangeran Hidayatullah" dalam *Kalimantan Scientia*, No. 17, Tahun VII (Banjarmasin: utp,1988), h. 4.

pejuang berdiri menghadang bayonet dan hanya bersenjata tombak dan pedang. Hanya kematian yang dapat menahan semangat juang mereka.

Kejadian seperti ini berlangsung terus menerus dan inilah yang dikenal dengan nama Perang Banjar (1859-1905 M). Tokoh-tokoh pejuang dari Perang Banjar antara lain adalah Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari.

Melihat penyebab terjadinya Perang Banjar seperti Perang Banjar adalah dalam arti khusus mempertahankan kedudukan dan sistem kerajaan di bawah Pangeran Hidayatullah sebagai raja yang sah menurut tradisi dan wasiat Sultan Adam, sedangkan dalam arti yang umum adalah perang suci, perang sabil, perang sebagai *jihad fi sabilillah*, melawan penjajah.

Pemerintahan Hindia Belanda Di Kalimantan Selatan

Sistem Pemerintahan Hindia Belanda mulai diberlakukan di Kalimantan Selatan ketika F.N. NIEUWENHUYZEN mengumumkan Proklamasi Penghapusan Kerajaan Banjar pada tanggal 11 juni 1860 M. Dalam proklamasi tersebut antara lain dinyatakan kerajaan Banjar dihapuskan dan tidak lagi diperintah oleh raja (sultan) dan seluruh pemerintahan dilingkungan bekas kerajaan Banjar langsung di bawah kekuasaan Gubernemen Hindia Belanda dibagian Selatan dan Timur pulau Borneo.⁹

Dengan penghapusan Kerajaan Banjar, maka status bekas kerajaan ini turun dengan drastis, di mana pada awalnya umat Islam mempunyai sitem politik dan pemerintahan sendiri dengan Kerajaan Banjar-nya, kini menjadi daerah dan bangsa jajahan yang dalam status sosial adalah bangsa kelas tiga dan terbawah.

Dalam hal pemerintahan, kolonial Belanda langsung menguasai tata laksana desa dengan kiai di atasnya sebagai penguasa yang langsung didampingi oleh *Controleur*. Kepala Kampung biasa disebut *Pambakal*, didampingi oleh beberapa *Pangerak*, *Kepala Padang*, *Kepala Sungai*, *Kepala Hutan* dan *Panakawan-Panakawan*. Pambakal biasanya dibantu oleh seorang wakil dan seorang juru tulis.

⁹Usman, "Pangeran Hidayatullah..."

Meskipun dari sisi politik dan pemerintahan umat Islam tidak dilibatkan oleh bangsa penjajah, akan tetapi di Banjarmasin bermunculan organisasi-organisasi yang bersifat keagamaan ada yang bersifat politik ada yang bersifat sosial, organisasi itu antara lain adalah Sarekat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan Musyawaratutthalibin.

1. Sarekat Islam (SI)

Sarekat Islam satu di antara organisasi politik Indonesia abad ke 20 yang paling modern dan menonjol. SI yang merupakan transformasi radikal dari Sarekat Dagang Islam (SDI), didirikan oleh H. Samanhudi pedagang batik asal Surakarta, Jawa Tengah. Perubahan nama pada tahun 1912 M dari SDI menjadi SI sekaligus merupakan perubahan orientasi dari perjuangan secara ekonomi menuju perjuangan "*ideologi negara*". Perubahan orientasi ini dipelopori oleh H.O.S. Cokroamonoto (1883-1934 M), yang menginginkan SI sebagai miniatur Negara Islam.

Si terbilang gencar mengembangkan aktifitasnya di Kalimantan Selatan sebagai upaya pemberdayaan rakyat pada masa-masa prakemerdekaan. Di antaranya memajukan perdagangan rakyat dalam menghadapi tekanan monopoli perdagangan golongan etnik Cina dan Belanda.¹⁰ Dan menentang pendapat-pendapat yang keliru tentang agama Islam. Organisasi SI berdiri di Banjarmasin pada tahun 1912 M, oleh H.M. Arif. Beliau adalah seorang pedagang yang pulang-pergi Banjarmasin-Surabaya.

Usai Kongres Nasional III pada tahun 1918 M di Surabaya, SI Kalimantan Selatan mulai menghimpun potensinya dengan membentuk departemen-departemen seperti perburuhan, pertanian dan nelayan. Demikian juga dalam memajukan komunikasi dan informasi sesama anggotanya menerbitkan surat kabar *Borneo Bergerak*.

Untuk menyalurkan aspirasi umat Islam dan rakyat yang hidup di Kalimantan Selatan, terutama menghadapi tekanan pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1923 dilangsungkan *National Borneo Congress* di Banjarmasin. Seluruh wakil SI di Kalimantan Selatan dan Timur serta wakil-wakil Perserikatan Dayak Kalimantan menghadirinya.

¹⁰Khairiada Asa, *Multi Partai dalam Perspektif Politik Lokal: Suatu Tinjauan Dinamika Politik di Kalimantan Selatan*, (Jakarta: PT. Griya Kertiyasa, 1999) h. 17

Melihat kegiatan-kegiatan dan besarnya pengaruh SI di kalangan masyarakat menyebabkan pemerintah Hindia Belanda menaruh kecurigaan dan melakukan pengawasan terhadap tokoh-tokoh SI, dan melakukan penangkapan terhadap H. Hasan Basuni, seorang tokoh SI yang berasal dari Amuntai. Kejadian semacam ini menyebabkan kegiatan SI mulai mengalami kemunduran.

2. Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah gerakan pembaharuan Islam dan gerakan pembaharuan kalangan nasionalis di Indonesia. Sebagai gerakan pembaharuan, Muhammadiyah mencerminkan sebuah hasrat untuk mengikuti Eropa dalam bentuk ekspresi yang sesuai dengan aspirasi mereka.¹¹ Tujuan Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujud masyarakat yang sebenarnya. Organisasi ini didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan (1861-1923 M) di Yogyakarta pada tahun 1912 M.

Pada tahun 1928 M, Muhammadiyah membuka cabangnya di Kuala Kapuas, kemudian pada tahun 1930 M didirikan cabang di Alabio, dan cabang di Banjarmasin. Organisasi ini berkembang dengan pesat, hal ini tidak lepas dari peran pedagang-pedagang Banjar yang melakukan perjalanannya ketanah Jawa terutama ke Surabaya dan Yogyakarta.

Meskipun faham Muhammadiyah telah masuk ke Banjarmasin sekitar tahun 1920 M, namun untuk tegaknya organisasi Muhammadiyah dikota ini perlu waktu untuk beberapa tahun lagi. Memang di samping kemampuan pemimpin-pemimpinnya, juga diperlukan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan pimpinan pusat Muhammadiyah di Yogyakarta. Akibat kondisi masyarakat Banjar dan kemampuan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, sehingga sebagaimana yang dikemukakan di atas maka Muhammadiyah lebih dahulu berdiri di Kuala Kapuas dan Alabio.

Kehadiran organisasi ini memberikan pengaruh dalam lapangan pendidikan, keagamaan, maupun sosial. Dalam lapangan keagamaan, sumbangan yang positif yang diberikan Muhammadiyah di Kalimantan

¹¹Cyrrill Blasse, *Ensiklopedi Islam Ringkas K* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999) h. 284.

Selatan adalah pemurnian ajaran Islam dari takhayul, bid'ah dan khurafat dalam segala bentuk baik menyangkut bidang akidah maupun syari'ah.

3. Nahdhatul Ulama

Lahirnya organisasi *Nahdhatul Ulama* tidak terlepas dari adanya perselisihan antara Kaum Tua dan Kaum Muda (Muhammadiyah). Perselisihan antara Kaum Muda dengan Kaum Tua di antaranya adalah menyangkut soal takhayul, khurafat dan praktik peribadatan seperti menyangkut masalah *ushalli, qunut, talkin, bilah, aruab, azan Jum'at* dua kali dan sebagainya yang dianggap Muhammadiyah sebagai bid'ah yaitu sesuatu yang menurut hukum Islam tidak berasal dalam ibadah dan merupakan embel-embel tak berdasar.

Untuk mempertahankan kebenaran ajaran ahlussunnah wal jamaah yang menurut sebagian ulama telah difitnah dalam dakwah oleh Kaum Muda, maka pada tahun 1926 M didirikan Nahdhatul Ulama di Surabaya dengan tujuan memajukan paham aliran tradisional, memelihara hubungan dengan para ulama dan pengikut mazhab empat, memajukan pendidikan, masjid dan kegiatan Lailatul Ijtima' serta tahlilan.¹²

Di Kalimantan Selatan Nahdhatul Ulama berdiri di Martapura pada tahun 1927 M diprakarsai oleh Haji Abdul Kadir yang kemudian dikenak dengan panggilan Tuan Guru Tuha. Di Martapura Nahdhatul ulama masuk melalui sekolah Darussalam Martapura. Masyarakat Martapura yang fanatik agama dan menjunjung kedudukan ulama tradisional segera mengikutinya, dan dari sinilah Nahdlatul Ulama berkembang dengan basisi-basisi utama daerah-daerah pedesaan. Pada tahun 1931 M di Banjarmasin dibuka cabang dengan tokoh-tokohnya antara lain Said Ali Alkaf, H. Akhmad Nawawi, dan H. Hasyim.¹³

Perkembangan Nahdlatul Ulama di Kalimantan Selatan terbilang sangat cepat, hal ini anantara lain dipengaruhi oleh frekuensi hubungan antara Banjarmasin dan Surabaya yang cukup tinggi, yang dilakukan baik oleh para santri yang menuntut ilmu di Pulau Jawa maupun pedagang.

¹²M. Idwar Saleh, Et.al, *Sejarah Daerah Tematis Zaman Kebangkitan Nasional*, (1900-1928) di Kalimantan Selatan, (Banjarmasin: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Depdikbud, Banjarmasin, 1978/1979) h. 47

¹³Depdikbud, *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*, (Banjarmasin: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1977/1978) h. 288

Sesuai dengan cita-cita yang diembannya, maka Nahdlatul Ulama bergerak dalam bidang sosial dan pendidikan. Walaupun pada mulanya bukan suatu organisasi yang bersifat politik, namun Nahdlatul Ulama menjalankan politik *non cooperatif* terhadap setiap bantuan maupun ajakan pemerintah Hindia Belanda untuk membangun masjid-masjid dan sekolah-sekolah maupun untuk duduk dalam lembaga pemerintahan, bahkan melalui sekolah-sekolah atau madrasah yang diasuh oleh ulama NU ditanamkan rasa cinta tanah air dan kebencian terhadap Belanda.¹⁴

4. Musyawaratuththalibin

Terbentuknya Musyawaratuththalibin di Kalimantan Selatan berkaitan erat dengan organisasi Islam yang mendahuluinya yaitu pertentangan antara Muhammadiyah dengan Nahdhatul Ulama, yaitu pertentangan dalam masalah furu' mengenai agama Islam, dan berdampak sangat luas dimasyarakat, sehingga umat Islam menjadi terpecah belah. Organisasi ini berfaham keagamaan yang berdasarkan Islam dan tujuannya adalah bekerja untuk kesempurnaan umat Islam dengan jalan membangun persatuan Islam, terutama guru-guru, ulama-ulama, penuntut-penuntut ilmu khususnya, dan kaum muslimin umumnya, memajukan dan menggemirakan cara hidup dengan mengamalkan segala perintah Islam. Organisasi ini berdiri pada tahun 1931 M, dan tokoh-tokoh pendirinya adalah Haji Ridwan Syahrani, Haji Majedi Effendi dan Haji Amin, dan mendapat dukungan para ulama, guru-guru agama dan penuntut-penuntut ilmu di Banjarmasin.

Karena organisasi ini bermaksud membangun persatuan Islam, jelas adanya keinginan akan kerukunan beragama oleh masyarakat. Dalam perkembangannya organisasi ini banyak mempunyai cabang di Kalimantan Selatan, bahkan sampai kepeisir Sumatera seperti Tembilahan, Enok, Kuala Tungkal, ditempat-tempat di mana terdapat pemukiman orang-orang Banjar perantauan. Organisasi ini bergerak dalam bidang keagamaan, dan bidang-bidang sosial.

¹⁴M. Syuriansyah Ideham, dkk, *Sejarah Banjar...*, h. 285

Zaman Pendudukan Jepang

Masyarakat Kalimantan Selatan adalah masyarakat yang fanatik dalam beragama, hal ini disadari oleh pemerintah Jepang, karena itu untuk meningkatkan kepercayaan para ulama bahwa Jepang memperhatikan kepentingan dan perkembangan agama Islam, maka pemerintah Jepang mendatangkan pegawai-pegawainya yang beragama Islam dan mempunyai pengetahuan tentang agama Islam. Ulama Islam Jepang yang didatangkan ke daerah ini ialah: Umar Faisal, Said Waqas, Tahir Zaki, Usman Yusuf, dan Sarik Imaizumi.¹⁵

Ulama-ulama Islam Jepang ini bersama Haji Abdurrahman membentuk Majelis Ulama, dan melalui wadah ini mereka mengendalikan umat Islam untuk bantuan-bantuan usaha-usaha perang Jepang. Madrasah atau pesantren di Amuntai yaitu Normal Islam dan Darussalam di Martapura ditutup oleh pemerintah Jepang, sehingga para ulama harus mengajarkan agama dari rumah ke rumah. Dan pemerintah Jepang juga menerapkan Nipponisasi atau penjepangan terhadap bangsa Indonesia yang dilaksanakan dengan intensif, melalui segala bidang, dari anak-anak sampai kepada orang dewasa.

Semua perkumpulan politik dan agama dilarang, sebagai gantinya terhadap umat Islam, Jepang membentuk organisasi keagamaan yang diberi nama *Jam'iyah Islamiyah Borneo* yang diketuai oleh Haji Abdurrahman Siddik, dan organisasi ini di bawah pengawasan ulama-ulama Jepang. Oleh karena itu, dengan melihat paparan di atas, maka bisa dilihat bahwa pada masa Jepang tidak ada aktifitas politik dan peran serta umat Islam dalam pemerintahan, meskipun begitu dengan adanya politik nipponisasi ada sisi positif bagi masyarakat Kalimantan Selatan, di antaranya hilangnya rasa permusuhan bagi sesama umat Islam, terutama antara golongan Kaum Tua dengan golongan Kaum Muda, dan sejak itu pula dimulai khotbah Jum'at dalam bahasa Indonesia yang sebelumnya hanya dalam bahasa Arab.

¹⁵Ramli Nawawi, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Daerah Kalimantan Selatan* (Banjarmasin: Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya, 1991) h. 26

Masa Kemerdekaan

Membicarakan peranan politik umat Islam di Kalimantan Selatan identik membicarakan partai-partai politik pada masa sesudah kemerdekaan. Pemilu pertama dilangsungkan pada tahun 1955 M, partai Islam yang ikut bertarung dalam pemilu pertama dan keluar sebagai salah satu pemenang yaitu Majelis Syuro muslim Indonesia yang mendapat 57 kursi dan Nhdhatul Ulama mendapat 45 kursi.

Sementara di Kalimantan Selatan termasuk Kalimantan Tengah) pada tanggal 10 Januari 1957 M dilantik perwakilan Kalimantan selatan yang dari partai Islam diwakili oleh Nahdlatul Ulama sebanyak 14 orang dan Masyumi 10 orang, sedangkan Anggota Perwakilan Daerah sebanyak 5 orang yang terdiri dari NU sebanyak 3 orang dan dari Masyumi 2 orang.

Dalam UU No.14 tahun 1956 tentang pembentukan DPRD dan DPD Peralihan, ditentukan antara lain bahwa DPRD peralihan akan bubar, sesudah DPRD atas dasar pemilihan umum dilantik, tetapi selambat-lambatnya satu tahun. Pada tanggal 24 September 1956 dinyatakan mulai berlaku tentang undang-undang pemilihan anggota DPRD (atas dasar pemilihan umum) berdasarkan undang-undang tahun 1956.

Akan tetapi meskipun satu tahun berlaku ternyata DPRD atas dasar undang-undang tersebut belum dapat dibentuk, maka pemerintah pusat dengan undang-undang darurat Nomor 9 tahun 1957 yang ditetapkan kemudian dengan undang-undang nomor 5 tahun 1958 ditentukan perpanjangan masa kerja DPRD peralihan dengan ketentuan baru dapat bubar setelah DPRD atas dasar pemilihan umum dilantik sampai dengan 17 juli 1957, Sementara DPRD peralihan terus berjalan, keluarlah UU Nomor 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok Peraturan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 yang menjadi dasar Pemerintahan Daerah ke DPRD semula, karena undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 18 januari 1957 sedangkan DPRD peralihan di wilayah Kalimantan selatan belum bubar, maka dengan sendirinya DPRD peralihan nmenjalankan wewenang berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1957.

Pada tanggal 16 Januari 1957 diadakan pelantikan DPRD Propinsi Kalimantan Selatan di mana tercermin semua perwakilan golongan politik yang terdiri atas: Nahdlatul Ulama, Masyumi, PNI, PKI, IPKI, PPTI dan Persatuan Dayak. Pemilihan umum selanjutnya berlangsung pada masa Orde Baru yaitu pada tahun 1971 Partai Islam yang ikut serta dalam pemilu kali ini adalah NU, Parmusi, PSII dan Perti, tapi yang mendapat suara hanya NU yang mendapat 2 kursi dan partai Parmusi hanya mendapat 1 kursi sedangkan PSII dan Perti tidak mendapat kursi.

Pada pemilu tahun 1977, partai-partai Islam membentuk Fusi yang bernama Partai Persatuan Pembangunan, dan untuk perwakilan di lembaga perwakilan DPR RI, Partai Persatuan Pembangunan Kalimantan Selatan memperoleh 5 kursi, dan kalau ditelusuri dari hasil pemilu 1955, maka Kalimantan Selatan termasuk wilayah basis NU, sehingga sangat wajar kalau Partai Persatuan Pembangunan memperoleh hasil yang signifikan di wilayah ini.

Masa jaya partai Islam di Kalimantan ternyata hanya pada putaran Pemilu 1982 saja. Adanya perubahan tanda gambar (dari ka'bah menjadi bintang sebagai bagian dari kesepakatan asa tunggal Pancasila tahun 1984) dan pengembosan warga NU (hasil muktamar NU tahun 1984 Situbondo yang mengeluarkan keputusan untuk kembali ke Khittah) menyebabkan perolehan suara PPP terus melorot pada pemilu-pemilu berikutnya. Pada pemilu 1987 dan 1992 PPP hanya berhasil mendapatkan 2 kursi dan pada pemilu 1997 mendapat 3 kursi.

Sedangkan untuk DPRD I Kalimantan Selatan, pada pemilu 1977 PPP mendapatkan 16 kursi dari 49 kursi yang diperebutkan, dan pada pemilu 1982 mengalami penurunan sebanyak 13 kursi dan pada pemilu 1987 hanya mendapatkan 9 kursi, dan pada pemilu 1992 mendapatkan 8 kursi, sedangkan pada pemilu 1997 mendapatkan 9 kursi.

Pada masa Kerajaan Banjar yang dimulai sejak tahun 1526 sampai dengan 1860, umat Islam berkuasa penuh menjalankan pemerintahannya, Agama Islam dijadikan dasar negara, sehingga penerapan hukum Islam bersifat universal, karena penguasa yang mempunyai kewajiban untuk menerapkan hukum Islam di kerajaan Banjar dengan kekuasaan yang ada pada mereka, mereka telah melaksanakannya

Penutup

Ciri khas politik dan pemerintahan pada masa itu adalah kekuasaan penuh berada pada umat Islam, sehingga dengan kekuasaan yang ada pada raja-raja banjar, islam dapat dijalankan secara kappah. Sesudah masa itu umat islam sama sekali tidak mempunyai peran politik karena pada saat itu yang berkuasa adalah bangsa penjajah yaitu bangsa Belanda dan jepang.

Setelah kemerdekaan pada tahun 1945,kiprah umat Islam di dalam dunia politik di kalimantan selatan disalurkan pada partai-partai Islam, yang pada pemilu tahun 1955 dimenangkan oleh Nahdatul Ulama dan Masyumi, sedangkan pada pemilu-pemilu berikutnya yaitu pada tahun 1971,1977,1982,1987,1992 dan 1997 perolehan suara partai Islam yang diwakili oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terutama sejak tahun 1987 sedikit-demi sedikit penurunan, yang sebabnya diasumsikan karena. Umat Islam kurang peduli terhadap arti penting peran politik pengembangan Islam dan kurang aspiratifnya figur-figur yang mengendalikan terhadap kebutuhan riil umat Islam dan rendahnya komitmen terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Daftar Pustaka

- Agama dan Etnisitas, Kajian tentang Asal-Usul Pembantukan Etnis Banjar*, Banjarmasin, Jurnal Kebudayaan Kandil Melintas Tradisi, Edisi 6 Tahun 11, Agustus-Oktober 2004
- Anshary Az, HA. Hafiz, *Membangun Kesadaran dan Kebersamaan Partai Politik Berbasis Islam Menyongsong Pemilu 2004*, Seminar Sehari "Integritas Partai Politik Berbasis Islam dalam Menghadapi Pemilu 2004", Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari Banjarmasin, 2003.
- Basuni, H. Ahmad, *Nur Islam di Kalimantan Selatan (Sejarah Masuknya Islam di Kalimantan Selatan*, Surabaya, Bina Ilmu, 1986.
- Depdikbud, *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*, Banjarmasin, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah 1977/1978.
- Ras, Johannes Jacobus, *Hikayat Banjar*, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1990

- Salim, Arsekal, *Partai Islam dan Relasi Agama-Negara*, Jakarta, Pusat Penelitian IAIN Jakarta, 1999.
- Saleh, Idwar, dkk, *Sejarah Daerah Tematis Zaman Kebangkitan Nasional (1900-1928) di Kalimantan Selatan*, Kanwil Depdikbud Kal-Sel, 1978/1979.
- Usman. HA. Gazali, *Urang Banjar dalam Sejarah*, Lambung Mangkurat University Press, 1989
- Chaidar, Ali, *Wacana Ideologi Islam Negara Islam, Studi Harakah Darul Islam dan Moro National Liberation Front*, Darul Falah, 1999.
- Ideham, M. Syuriansyah, dkk, *Sejarah Banjar*, Banjarmasin, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan, 2003 .